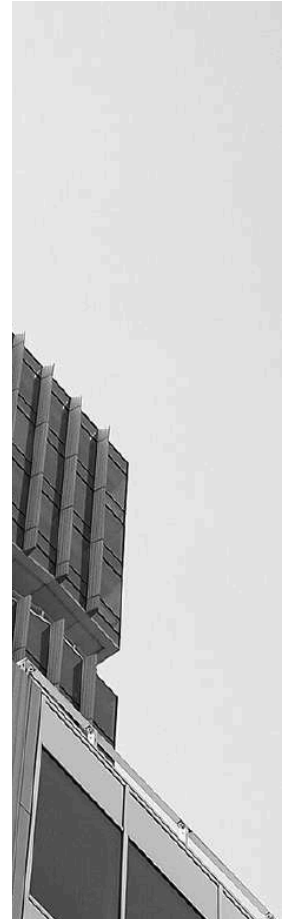




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



TAHUN
2025

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Phone: (0286) 321078
Fax: (0286) 321078

Jalan Letjend. S. Parman No
8B, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah 56311

Email:
dikpora@wonosobokab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosobo, 18 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196801041997021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Misi misi ke-3 yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
2. Tujuan ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan.
Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu.
3. Tujuan ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga.
Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi.
4. Tujuan ke-3 yaitu Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat.
Sasaran ke-3 Meningkatkan pelayanan publik
Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Adapun Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan, Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga, dan Meningkatkan pelayanan publik. Tujuan ini diukur dalam delapan indikator sasaran dengan realisasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS): 12,05 tahun.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 6.91 tahun.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun: 100%.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun: 100%
5. Cakupan Pemuda Berprestasi: 0,06%
6. Persentase Atlet Berprestasi: 45.65%
7. Indeks Kepuasan Masyarakat: 93.92
8. Nilai Evaluasi SAKIP: 72.09

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	8
1.3. Data Umum Organisasi	8
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
1.5. Isu Strategis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	18
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1. Rencana Strategis.....	22
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	30
3.2. Realisasi Anggaran	41
BAB IV P E N U T U P.....	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Rekomendasi dan Saran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	23
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	26
Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30
Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	32
Tabel 3. 3. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025	34
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran 1.....	35
Tabel 3. 5. Capaian Kinerja Sasaran 2.....	38
Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Sasaran 3.....	39
Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.....	9
Gambar 1. 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	10
Gambar 1. 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	11
Gambar 1. 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

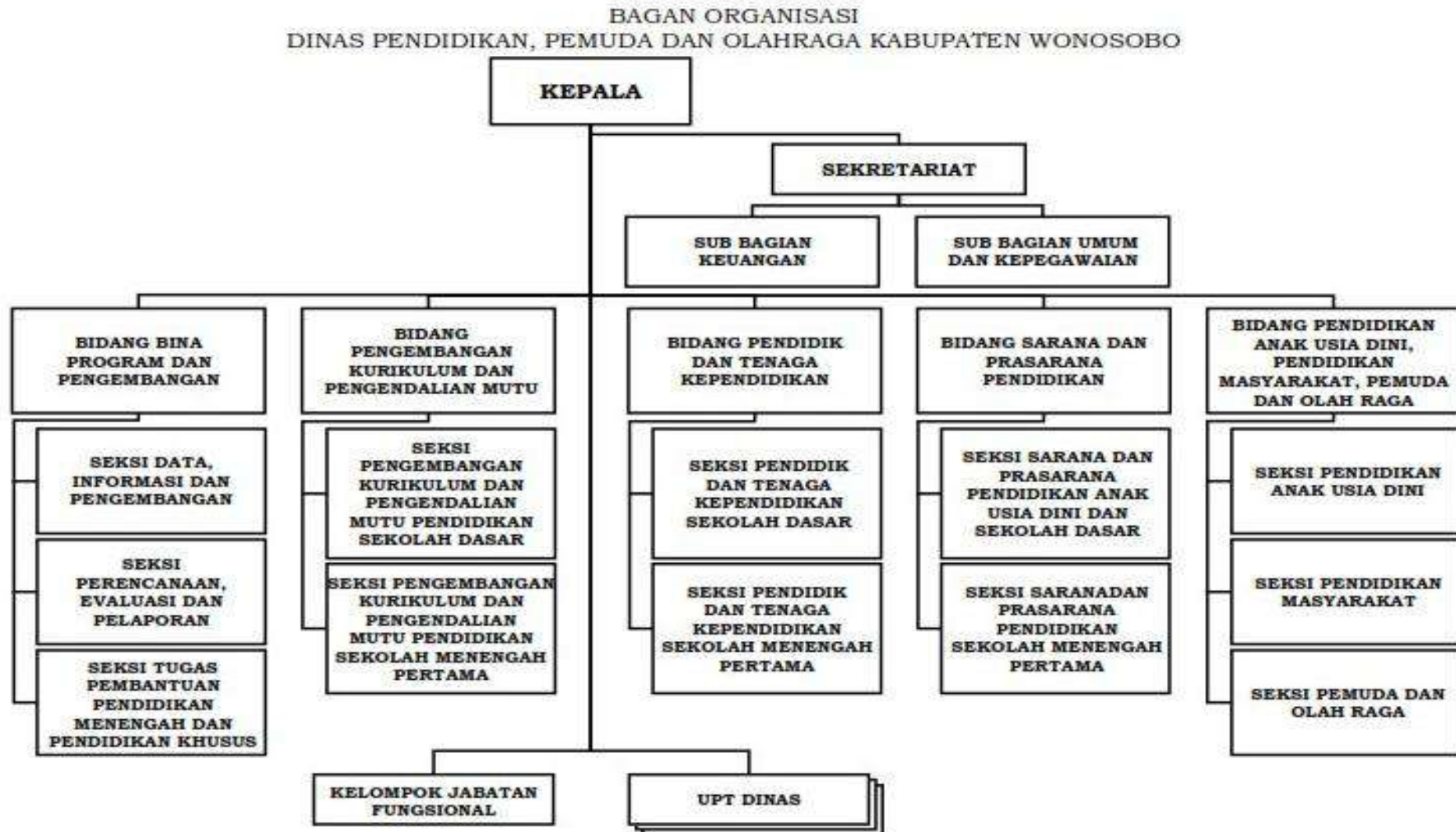
1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Peraturan Bupati tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 yang hasilnya akan disampaikan dalam bentuk LKjIP.

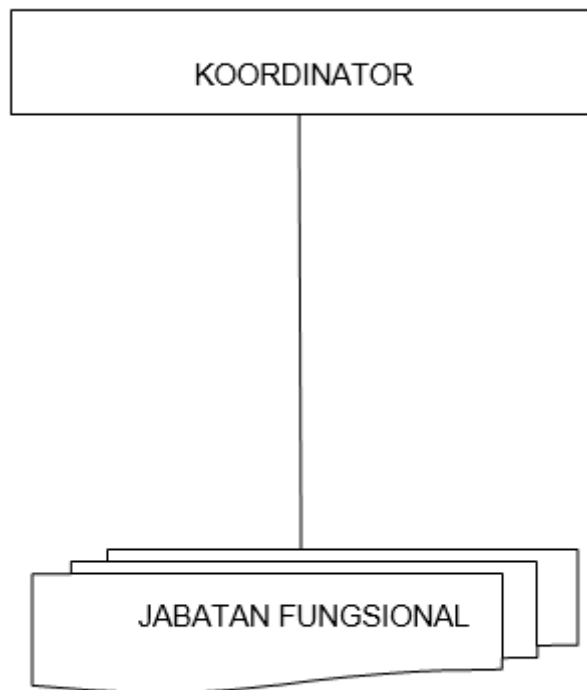
1.3. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo terdiri dari satu sekretariat, lima bidang, serta lima belas Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sementara, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, didalamnya mengatur perihal UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai pelayanan administrasi bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang dipimpin seorang koordinator berasal dari pengawas sekolah atau kepala sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau bisa berasal dari pegawai negeri sipil lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis berupa Satuan Pendidikan Daerah yang terdiri dari Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :

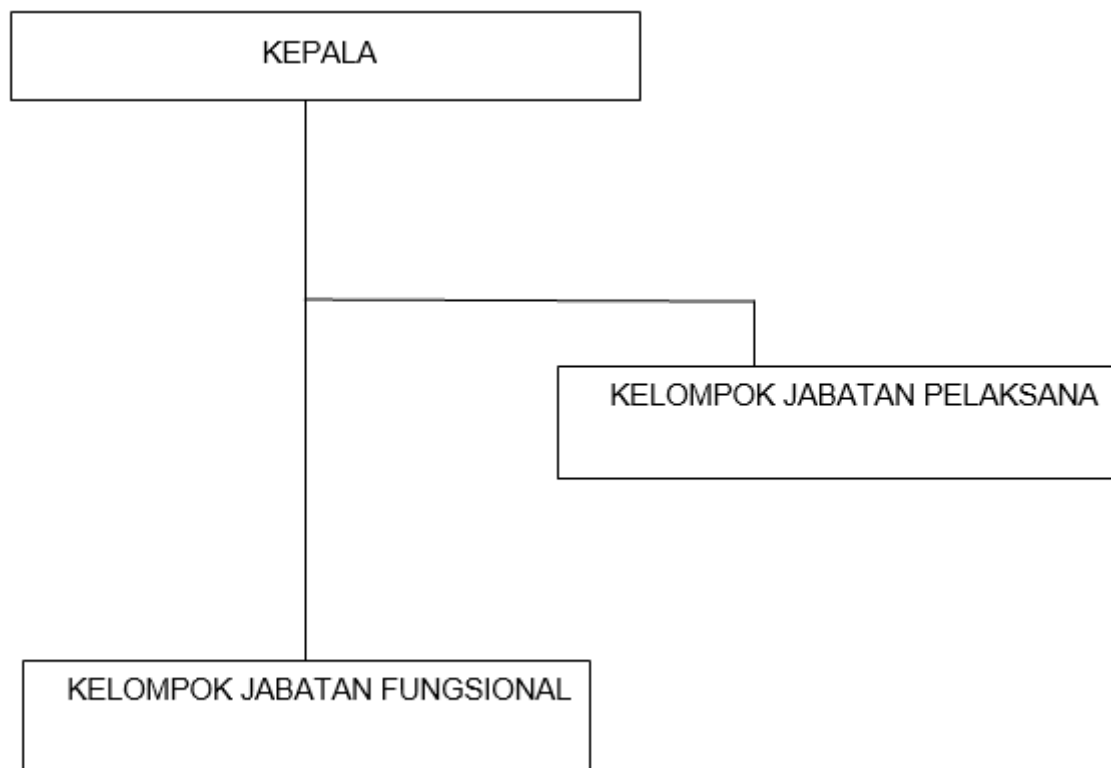
Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo



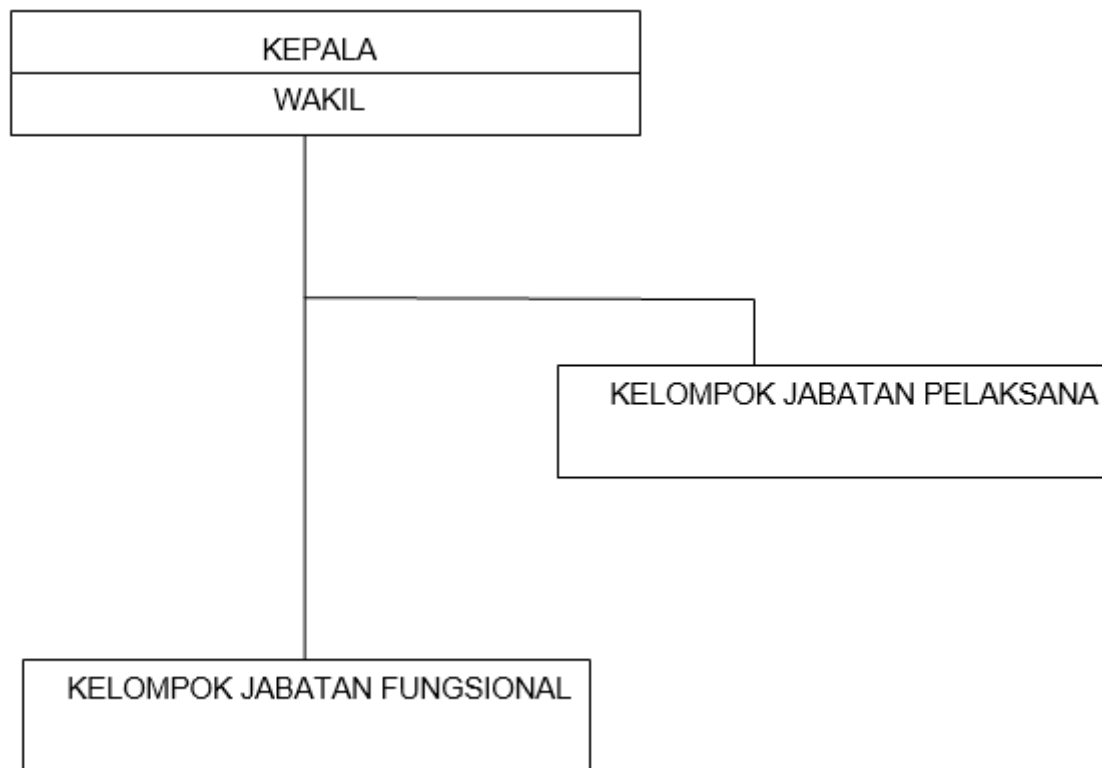
Gambar 1. 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 1. 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 1. 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dinas daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Disamping itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pemuda dan olahraga; pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum pendidikan; pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pemuda dan olahraga; pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, pengendalian mutu pendidikan; pemberian rekomendasi perijinan di bidang pendidikan; pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang pendidikan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok :

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga serta kesekretaritan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, serta kesekretaritan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretaritan dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan UPT; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok:

Sekretaris Dinas adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris berkedudukan di sekretariat yang mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Pengembangan

a. Tugas Pokok:

Bidang Bina program dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, bidang bina program dan pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- b. Fungsi :
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program dan pengembangan;
 - 4) Pengelolaan data dan system informasi manajemen bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
 - 5) Pengkoordinasian tugas pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - 6) Penyiapan bimbingan teknis supervise dibidang bina program dan pengembangan; dan
 - 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.
4. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu
- a. Tugas Pokok:
- Bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang pengembangan kurikulum dan pengembangan mutu mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- b. Fungsi:
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga

a. Tugas Pokok:

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga yang mempunyai fungsi :

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 4) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
- 5) Perumusan dan penyiapan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- 6) Pembinaan dan pengembangan bidang pemuda dan olahraga pelajar;
- 7) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga; dan
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga.

6. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Tugas Pokok:

Bidang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan , kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) Pengembangan kapasitas, kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
 - 5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
- a. Tugas Pokok:
Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan prasarana, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasaran pendidikan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - 4) Pengkajian dan pemetaan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan;
 - 5) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 6) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Jabatan		Berdasarkan Goongan/Ruang	
Pendidikan	Jumlah	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah
SD	21	IV	14	I/c	2
SLTP	60	III	6	I/d	1
SLTA	626	II	1	II/a	26
D2	14			II/a	26
D3	17			II/b	1
D4/S1	4348			II/c	30
S2	316			II/d	10
S3	2			III/a	310
				III/b	272
				III/c	661
				III/d	618
				IV/a	239
				IV/b	324
				IV/c	141
				PPPK	2001
JUMLAH	5404		21		4662

1.5. Isu Strategis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rendahnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu adanya kesenjangan akses ke sekolah, kesenjangan kualitas sarpras sekolah, kesenjangan mutu sekolah antar wilayah serta adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa Pendidikan tidak penting.

Setiap anak mempunyai hak atas Pendidikan tanpa melihat status sosial, kondisi geografis, dan kondisi fisik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk memenuhi kecukupan akses Pendidikan secara merata dengan penyiapan akses infrastruktur, layanan informasi dan komunikasi serta layanan transportasi. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang inklusif sebagai pendukung pembelajaran, pemerataan mutu Pendidikan.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori sedang. Hanya saja, salah indikator penilaian yaitu rata-rata lama sekolah masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan yang masih harus diatasi yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun;
 - b. Masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan;

- e. Belum meratanya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - d. Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - e. Masih rendahnya wirausaha pemuda.

Berdasarkan analisis layanan pendidikan dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka permasalahan pendidikan yang muncul adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. APK PAUD masih rendah
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik PAUD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Jumlah lembaga PAUD yang berakreditasi masih minim
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Jumlah Lembaga pendidikan Non Formal yang terakreditasi masih minim
 - b. Mutu layanan pendidikan non formal masih harus ditingkatkan baik dari program layanan, kualitas tutor/instruktur serta sarana dan prasarana.
3. Pendidikan Dasar
 - a. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih terdapat satuan pendidikan SD dan SMP dengan akreditasi kurang dari B dan satuan pendidikan SD
 - c. Kegiatan pengembangan diri siswa belum sepenuhnya terlayani
 - d. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
 - e. Pendidik SD dan SMP belum terdistribusi secara merata
 - f. Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
 - g. Masih terdapat guru yang belum bersertifikat profesi guru;
 - h. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih harus ditingkatkan.
 - i. Masih ditemukan anak putus sekolah
4. Pemuda dan Olahraga
 - a. Masih terdapat organisasi kepemudaan yang belum memiliki legalitas organisasi
 - b. Pembinaan organisasi kepemudaan untuk mendukung pengembangan diri pemuda masih harus ditingkatkan
 - c. Pemberian ruang kreatif pemuda masih minim
 - d. Prestasi olahraga belum maksimal
 - e. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan atlet dan pelatih

- f. Terbatasnya sarana penunjang gelanggang remaja dan lapangan olahraga milik pemerintah;

1.6. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten maupun Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan APBD/APBDP Tahun Anggaran 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2025
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam sistem pendidikan di Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang mampu menyentuh aspek akses, mutu pendidikan, relevansi dan daya saing.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, guna terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari pertimbangan potensi, sumber daya, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan acuan dan referensi bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional dan juga dalam melakukan evaluasi tugas dan pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

Adapun misi yang diemban adalah misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius ,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran untuk pembangunan daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi Bupati dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026. Sebagai

bagian dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan Pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan
 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemuda dan
 Sasaran 2 : olahraga
 Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi

3. Tujuan 3 : Berkembangnya inovasi dan pelayanan
 Sasaran 3 : publik untuk kepuasan masyarakat
 Meningkatkan pelayanan public
 Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator sasarannya adalah indeks pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Ringkasan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi
			Persentase Atlet Berprestasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
3	Meningkatkan pelayanan publik	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Guna Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern.

Makna yang terkandung dalam misi ketiga ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dan meningkatkan pelayanan publik, strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, penguatan kurikulum yang ink, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing, serta peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan layanan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana sekolah inklusif dan sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. Penyediaan beasiswa melalui gerakan Kembali kesekolah;
 - c. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak disabilitas usia pendidikan dasar;
 - d. Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun karakter siswa;
 - e. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup untuk menumbuhkan jiwa kewriusaha, mandiri dan berkarakter pada tingkat pendidikan dasar;

- f. Pemerataan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebijakan sistem zonasi;
 - g. Peningkatan komitmen, peras serta Kerjasama stakeholder dan masyarakat untuk mendukung partisipasi pendidikan.
2. Meningkatkan kecakapan hidup pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri melalui peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapsitas pemuda serta kemitraan dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan pasrtisipasi aktif sosial dan politik pemuda;
 - b. Peningkatan kewirausahaan pemuda;
 - c. Peningkatan peran Lembaga kepemudaan dalam mengoptimalkan peran pemuda;
 - d. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja kelompok pemuda.
 3. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat melalui pengembangan inovasi pelayanan public untuk kemudahan layanan, dengan prioritas pada:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan asset;
 - b. Pemenuhan sarpras pendukung kinerja;
 - c. Peningkatan sarpras layanan publik.

Pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didukung dengan program unggulan **“Wonosobo Pinter”** dalam bentuk pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan rama HAM, Gerakan Kembali ke sekolah/pengembalian anak ke sekolah, dan **“Wonosobo Sehat”** dalam bentuk *sport centre* Wonolelo.

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2025 merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

VISI		: TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI III		: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	1 Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Mengukur lamanya sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan, usia 7 tahun keatas	BPS
			2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Mengukur jumlah tahun yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal	BPS
			3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, pada usia 7-12 tahun	Kemendikdasmen, Dapodik
			4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, pada usia 13-15 tahun	Kemendikdasmen, Dapodik
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	1 Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	1 Cakupan Pemuda Berprestasi	Mengukur jumlah pemuda berprestasi dibandingkan jumlah seluruh pemuda	Penghitungan Dinas Dikpora
			2 Persentase Atlet Berprestasi	Mengukur jumlah atlet berprestasi dibandingkan jumlah atlet yang dibina	Penghitungan Dinas Dikpora
3	Meningkatkan pelayanan publik	1 Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei pelayanan publik.	Survei kepuasan masyarakat
			2 Nilai SAKIP	Hasil penilaian akuntabilitas laporan kinerja	Hasil reviu akuntabilitas kinerja

2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

Mengacu pada Renstra Tahun 2016-2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Pada awal tahun, setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Penetapan Kinerja atas alokasi anggaran yang disediakan untuk semua kegiatan yang ditetapkan. Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja disusun dengan tujuan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, laporan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP dan menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada tahun tersebut, di samping merupakan penjabaran target capaian rencana strategis lima tahunan yang telah disusun. Dalam dokumen Renstra termuat indikator-indikator capaian dalam rentang waktu lima tahun. Meskipun secara normatif target tahunan capaian indikator tersebut harus tertuang dalam bentuk kegiatan tahunan yang relevan dan terintegrasi, namun karena berbagai hal tidak semua kegiatan yang dilaksanakan berdampak langsung pada capaian kinerja tahunan yang ditargetkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua kegiatan terkait langsung dengan capaian indikator outcome antara lain karena alokasi anggaran dengan sumber anggaran dari pusat/provinsi dengan sasaran dan bentuk/sifat kegiatannya sudah ditentukan.

Penetapan kinerja tahun 2025 dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja, mempunyai tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	12,05	Program Pengelolaan Pendidikan	149.809.842.042
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	7,75	Program Pengembangan Kurikulum	235.000.000
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,8	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	72.800.000
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	97,6		
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	%	0,049	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	430.000.000
			Persentase Atlet Berprestasi	%	68.61	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.280.000.00
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	230.000.000
3	Meningkatkan pelayanan publik	Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	93.95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503.833.214.544
			Nilai Evaluasi SAKIP	Huruf	A		
JUMLAH							655.538.856.586

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bab ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan dijadikan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian IKU dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Pertama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun hasil pengukuran antara rencana kinerja terhadap realisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	11,81	12.05	12.05	100.00%	12,1	99.59
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	6,89	7.75	6.91	89.16%	7,87	87.8
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,89	99.8	99.64	99.84%	100	99.64
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun	%	92,03	97.6	90.08	92.30%	98,15	91.78
2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	%	0,04	0.049	0.06	122.45%	0,049	122.45
		Persentase Atlet Berprestasi	%	68.60	68.61	45.65	66.54%	6,40	713.28
3	Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	93,94	93.95	93.92	99.97%	84,50	111.15
		Nilai Evaluasi SAKIP	Huruf	BB	A	BB		A	

Disamping pencapaian kinerja, pengukuran efisiensi capaian kinerja merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi karena menentukan sejauh mana penggunaan sumber daya dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Efisiensi dalam kinerja tidak hanya mencakup pengurangan biaya, tetapi juga optimalisasi proses kerja, peningkatan produktivitas, dan pencapaian target yang telah ditetapkan secara efektif. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan membandingkan rasio input terhadap output, di mana input dalam perjanjian kinerja tercantum dalam bentuk anggaran.

Pentingnya pengukuran efisiensi capaian kinerja tidak hanya terletak pada evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya, tetapi juga dalam memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya data yang akurat dan analisis yang tepat, organisasi dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Selain itu, pengukuran efisiensi juga dapat digunakan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam sektor publik, di mana efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor krusial dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan sistem pengukuran efisiensi yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara yang lebih produktif, efektif, dan berkelanjutan. Berikut tingkat efisiensi anggaran atas tercapainya kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025:

Tabel 3. 3. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian 2025			Anggaran		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	4	Sangat tinggi	4	100	150.117.642.042	138.320.165.007	92,14
			Tinggi	-	-			
			Sedang	-	-			
			Rendah	-	-			
			Sangat Rendah	-	-			
2.	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	2	Sangat tinggi	2	100	9.940.000.000	6.491.463.645	65,31
			Tinggi	-	-			
			Sedang	-	-			
			Rendah	-	-			
			Sangat Rendah	-	-			
3.	Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	2	Sangat tinggi	2	100	503.833.214.544	323.443.702.304	64,20
			Tinggi					
			Sedang					
			Rendah					
			Sangat Rendah					

Rincian capaian kinerja sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

A. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,81	12.05	12.05	100.00	12.1	99.59
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,89	7.75	6.91	89.16	7.87	87.80
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,89	99.8	99.64	99.84	100	99.64
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	92,68	97.6	90.08	92.30	98.15	91.78

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan yang mencerminkan rata-rata tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin baik pula akses dan kesempatan belajar yang dimiliki oleh masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo menunjukkan progres yang sangat positif dengan angka 12,05 tahun. Capaian ini berhasil memenuhi target tahunan 12,05 dengan tingkat ketercapaian 100,00% (Kategori Sangat Tinggi).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 11,81 tahun, terdapat peningkatan signifikan sebesar 0,24 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Wonosobo semakin membaik dan selaras dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Terhadap Target Akhir Renstra (12,1 tahun), capaian tahun 2025 telah berada pada posisi 99,59%, yang berarti target jangka menengah hampir terpenuhi sepenuhnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang semakin merata serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sekolah bagi anak usia dini hingga menengah.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia tertentu dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun, berbagai faktor seperti aksesibilitas, kondisi ekonomi, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan angka ini, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Pada tahun 2025, realisasi RLS Kabupaten Wonosobo berada pada angka 6,91 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan tahun 2024 (6,89 tahun), namun masih berada di bawah Target PK tahun 2025 sebesar 7,75 tahun dengan tingkat ketercapaian 89,16%.

Rendahnya tingkat ketercapaian ini disebabkan oleh tantangan demografis, di mana indikator RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang mayoritas sudah tidak berada dalam usia sekolah formal. Terhadap Target Akhir Renstra (7,87 tahun), capaian saat ini baru mencapai 87,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk secara rata-rata baru menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Meskipun terdapat peningkatan setiap tahunnya, akselerasi RLS memerlukan intervensi khusus pada pendidikan kesetaraan bagi orang dewasa (Pendidikan Non-Formal) untuk mendorong peningkatan angka literasi dan lama sekolah pada populasi dewasa.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akses pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang SD untuk usia 7-12 tahun. Tingginya angka partisipasi sekolah mencerminkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata serta mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Pada tahun 2025, realisasi APS usia 7-12 tahun mencapai 99,64%. Jika dibandingkan dengan Target PK tahun 2025 sebesar 99,8%, maka tingkat ketercapaian kinerja berada pada angka 99,84% (Kategori Sangat Tinggi).

Meskipun terdapat penurunan tipis dibandingkan tahun 2024 (99,89%), angka ini tetap menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam pelayanan pendidikan dasar. Terhadap Target Akhir Renstra (100%), capaian tahun 2025 berada pada posisi 99,64%. Tingginya partisipasi pada jenjang ini didukung oleh sebaran Sekolah Dasar yang telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Wonosobo serta program bantuan operasional yang meminimalisir hambatan biaya bagi siswa kurang mampu.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

APS usia 13-15 tahun menunjukkan partisipasi siswa pada jenjang SMP atau sederajat. Pada tahun 2025, realisasi APS usia 13-15 tahun tercatat sebesar 90,08%. Capaian ini masih berada di bawah Target PK tahun 2025 sebesar 97,6% dengan tingkat ketercapaian 92,30%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 (92,68%), indikator ini mengalami penurunan sebesar 2,6 poin. Hal ini menjadi catatan penting dalam kinerja tahun 2025, di mana tantangan ekonomi pasca-pandemi dan faktor sosial seperti pernikahan dini atau kecenderungan bekerja di usia muda masih menjadi penghambat pada jenjang menengah pertama. Terhadap Target Akhir Renstra (98,15%), capaian saat ini baru berada pada posisi 91,78%. Upaya percepatan melalui penyisiran Anak Tidak Sekolah (ATS) dan optimalisasi program beasiswa/bantuan pendidikan menjadi prioritas utama untuk mengejar ketertinggalan target di tahun mendatang.

B. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi

Tabel 3. 5. Capaian Kinerja Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	0,04	0.049%	0.06%	122.45%	0.0492	1.22
		Persentase Atlet Berprestasi	68.60	68.61%	45.65%	66.54%	6.4	7.13

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Cakupan Pemuda Berprestasi

Indikator ini mengukur keberhasilan pembinaan kepemudaan dalam mencetak individu yang mampu meraih prestasi di berbagai bidang. Pada tahun 2025, indikator Cakupan Pemuda Berprestasi mencapai angka 0,06%. Capaian ini melampaui target tahunan sebesar 0,049% dengan tingkat ketercapaian sebesar 122,45% (Kategori Sangat Tinggi). Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,04%, terdapat peningkatan performa yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan organisasi kepemudaan, termasuk kolaborasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Wonosobo, berjalan sangat efektif dalam menstimulus potensi pemuda. Terhadap Target Akhir Renstra (0,0492), capaian tahun 2025 telah menunjukkan angka 1,22 (telah melampaui target jangka menengah). Prestasi pemuda di bidang teknologi, wirausaha, dan seni budaya ini menjadi motor penggerak bagi generasi muda lainnya di Wonosobo untuk terus berinovasi dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.

2. Persentase Atlet Berprestasi

Indikator ini mencerminkan efektivitas pembinaan olahraga melalui raihan medali atau prestasi dalam ajang kejuaraan resmi. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Atlet Berprestasi berada pada angka 45,65%. Capaian ini berada di bawah Target PK tahun 2025 sebesar 68,61% dengan tingkat ketercapaian kinerja 66,54%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 68,60%, terdapat penurunan realisasi yang cukup tajam. Hal ini dipengaruhi oleh siklus tahunan ajang kejuaraan olahraga, di mana pada tahun 2025 intensitas kompetisi tingkat regional

maupun nasional tidak sebanyak tahun sebelumnya, serta adanya pengetatan standar kualifikasi prestasi bagi para atlet. Meskipun secara tahunan belum memenuhi target, jika dikomparasikan dengan Target Akhir Renstra (6,4), capaian saat ini berada pada posisi 7,13, yang berarti secara akumulatif target jangka menengah tetap terjaga. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen pelatihan dan kesejahteraan atlet guna memastikan semangat sportivitas dan disiplin tetap tinggi, sehingga pada tahun mendatang rasio prestasi atlet dapat kembali meningkat.

Di tingkat masyarakat, prestasi olahraga dapat mempererat persatuan dan solidaritas sosial. Keberhasilan atlet di ajang kejuaraan baik lokal, regional, nasional maupun internasional sering kali menjadi kebanggaan bersama yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan prestasi olahraga juga dapat membuka peluang ekonomi seperti berkembangnya industri olahraga, sektor pariwisata olahraga, serta meningkatnya minat investasi dalam infrastruktur dan fasilitas olahraga. Disamping itu, prestasi olahraga juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki atlet-atlet berprestasi akan lebih dihormati dan mampu menunjukkan citra positif. Keberhasilan di bidang olahraga juga dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antardaerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan olahraga melalui kebijakan yang berorientasi pada pembinaan atlet, peningkatan fasilitas, serta program-program yang mendukung kesejahteraan dan regenerasi atlet. Dengan upaya yang berkelanjutan, prestasi olahraga dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat besar bagi individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

C. Sasaran 3

Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Sasaran 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
3	Berkembangnya inonasi dan pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	93,94	93.95	93.92	99.97%	84.5	111.15%

publik untuk kepuasan masyarakat	(IKM)						
	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	BB	90.06%	73	98.75%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen utama untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memenuhi harapan masyarakat. Pada tahun 2025, capaian IKM tercatat sebesar 93,92 dengan predikat Sangat Baik. Tingkat ketercapaian kinerja terhadap target tahunan (93,95) mencapai 99,97% (Kategori Sangat Tinggi). Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 93,94, nilai IKM pada tahun 2025 cenderung stabil meskipun mengalami fluktuasi yang sangat kecil (turun 0,02 poin). Namun demikian, jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 84,5, capaian tahun 2025 ini telah melampaui target jangka menengah tersebut dengan tingkat ketercapaian mencapai 111,15%. Tingginya nilai IKM ini mencerminkan respon positif masyarakat terhadap kecepatan dan profesionalisme pelayanan di lingkungan dinas. Meskipun begitu, tantangan pada aspek sarana prasarana pendukung pelayanan (seperti kenyamanan ruang tunggu dan kecepatan sistem input data) tetap menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode mendatang. Hal ini penting guna memastikan bahwa standar pelayanan prima tetap terjaga secara konsisten meskipun terdapat dinamika pada jumlah pengguna layanan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator ini mengukur tingkat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap hasil yang dicapai. Pada tahun 2025, realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mempertahankan Predikat BB (Sangat Baik). Terhadap Target PK tahun 2025 yang dipatok pada Predikat A, tingkat ketercapaian kinerja secara numerik berada pada angka 90,06%. Meskipun belum berhasil meraih Predikat A sesuai target ambisius tahunan, realisasi ini menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang sudah baik. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra yang sebesar 73, capaian tahun 2025 ini menunjukkan progres yang sangat baik dengan tingkat ketercapaian terhadap Renstra sebesar 98,75%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja, telah

berjalan secara sistematis sesuai dengan peta jalan organisasi. Catatan evaluasi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan nilai SAKIP masih memerlukan penguatan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan sinkronisasi antara perencanaan dengan pemanfaatan anggaran yang lebih presisi (efektivitas program). Dengan mempertahankan Predikat BB, dinas tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dianggarkan melalui APBD Kabupaten Wonosobo. Total Anggaran adalah Rp663.890.856.586 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp468.255.330.956 atau dengan serapan mencapai 70,53% dan sisa lebih anggaran sebesar Rp195.635.525.630. Adapun komponen struktur belanja terdiri dari:

A. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp618.216.449.907 dengan realisasi Rp517.052.649.761 (83,64%).

B. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp35.734.406.679 dengan realisasi Rp34.351.289.808 (96.13%).

Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realsasi (Rp)	%
BELANJA TOTAL		709.880.797.265	698.689.238.073	98
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149.809.842.042	138.048.108.317	88.2 2
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.552.373.728	70.826.722.933	93.7 5
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.218.263.600	38.659.846.363	87.4 3
	c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.135.399.000	18.936.640.522	98.9 6
	d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.903.805.714	9.625.043.499	88.2 7
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	235.000.000	210.286.690	89.4 8
	a. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	160.000.000	137.511.690	85.9 4

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realsasi (Rp)	%
	b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	75.000.000	72.775.000	97,03
3	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	72.800.000	61.770.000	84,85
	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	72.800.000	61.770.000	84,85
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	430.000.000	383.021.000	89,07%
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	430.000.000	383.021.000	89,07%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.280.000.000	5.878.442.645	63,35%
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	2.400.000.000	2.211.130.100	92,13%
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	691.427.950	86,43%
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	100%
	d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.830.000.000	2.725.884.595	46,76%
	e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000	150.000.000	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	230.000.000	230.000.000	100
	a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	230.000.000	230.000.000	100
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	503.833.214.544	323.443.702.304	64,20%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	410.755.540	91,28%
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	501.038.684.544	320.937.349.684	64,05%
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.200.000	532.825.776	89,97%
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.730.000	141.247.500	98,27%
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.100.000	981.917.616	86,89%
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.500.000	439.606.188	91,87%

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar bertujuan untuk mendukung perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu layanan pada jenjang sekolah dasar. Peningkatan akses diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan dibandingkan dengan kebutuhan sesuai jumlah anak usia sekolah dasar serta peningkatan partisipasi sekolah. Sedangkan upaya peningkatan mutu pendidikan diupayakan dengan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara kuantitas maupun secara kualifikasi pendidikan. penerapan kurikulum pembelajaran. peningkatan kualitas kelembagaan sekolah. serta berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan potensi dan minat bakat peserta didik. Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Wonosobo tercermin dalam alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Sesuai dengan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, sub bidang pendidikan Sekolah Dasar mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sub bidang Pendidikan Sekolah Dasar senilai Rp623.783.000 dengan realisasi sebesar Rp580.169.976 (93.01%). Anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2025 digunakan untuk Pengadaan Peralatan TIK di 6 Satuan Pendidikan diantaranya PERALATAN TIK SD NEGERI 3 KERTEK, PERALATAN TIK SD NEGERI 3 LAMUK ,PERALATAN TIK SD NEGERI 4 JARAKSARI , PERALATAN TIK SD NEGERI 2 WADASLINTANG ,PERALATAN TIK SD NEGERI TAWANGSARI, PERALATAN TIK SD NEGERI 2 EROREJO.

Beberapa pembangunan dan pengadaan barang di satuan pendidikan meliputi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di 1 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah di 1 sekolah, Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah di 17 sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di 3 sekolah, Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar di 4 sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru di 5 sekolah. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang bersumber anggaran dari DAK 6 sekolah. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah di 4 sekolah 2 diantaranya bersumber anggaran BTT, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di 20 sekolah 3 diantaranya bersumber anggaran BTT, Ruang guru di sekolah merupakan fasilitas penting yang berfungsi sebagai tempat bagi para pendidik untuk beristirahat, berdiskusi, serta menyusun rencana pembelajaran. Ruangan ini biasanya dilengkapi dengan meja, kursi, lemari penyimpanan dokumen, serta papan informasi yang berisi jadwal dan pengumuman penting. Selain itu, ruang guru juga menjadi tempat bagi para guru untuk berdiskusi mengenai

perkembangan akademik siswa serta menyelesaikan tugas administratif. Dengan suasana yang nyaman dan mendukung, ruang guru dapat meningkatkan kinerja serta kolaborasi antar pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.

Oleh karena itu, dilaksanakan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di SD Negeri 1 Leksono dengan alokasi anggaran Rp100.000.000 dan realisasi Rp.96.638.000 (96.64%). Selain pembangunan, terhadap beberapa prasarana ruang guru/ruang kepala sekolah yang mengalami kerusakan juga dilakukan rehabilitasi pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dialokasikan anggaran sebesar Rp600.000.000 dengan realisasi Rp592.692.000 (98.78%) yang dipergunakan untuk rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya pada SD N Jojogan, SD N Wonosari, SD N 1 Pecekelan.

Disamping ketersediaan ruang pembelajaran, sarana pendukung lainnya di sekolah juga tidak kalah penting ketersediaannya. Bentuk sarana pendukung tersebut antara lain berupa pengamanan lingkungan sekolah (pagar sekolah), senderan, toilet sekolah, lapangan olahraga/bangunan olahraga dan penataan lingkungan sekolah. Oleh karena itu pada tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang merupakan kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya kawasan/lingkungan yang sehat, aman dan terjangkau. Alokasi anggaran Rp2.520.000.000 direalisasikan Rp2.475.221.000 (98.22%) dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi penataan lingkungan di 17 Sekolah, antara lain SD Negeri 1 Pungangan, SD N 1 Wonoroto, SD N 2 Buntu, SD N 1 Tempuranduwur, SD N Kebrengan, SDN Wringinanom, SD N 1 Trimulyo Kec Wadaslintang, SD N 2 Dempel Kec. Kalibawang, SD N Wonolelo, SD N 1 Pacarmulyo Kec. Leksono, SD N 2 Rimpak Kec. Sapuran, SD N 2 Deroduwur Kec. Mojotengah, SD N 2 Tempursari, SD N 3 Wonokampir, SD 2 Lumajang, SD N Surengede, SD Al-Madina, MI Bendosari. Dengan tersedianya ruang Sarana dan Prasarana pendidikan beserta perabotan diharapkan di sekolah akan menjadi sarana penanganan secara dini terhadap terjadinya gangguan kesehatan peserta didik di sekolah, serta menjadi semakin termotivasi untuk mewujudkan sekolah sehat dan aman.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang mengalami kerusakan sedang maupun berat agar kembali laik fungsi, aman, dan mendukung

terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan dan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah serta mengacu pada standar teknis bangunan pendidikan yang berlaku.

Lingkup kegiatan meliputi perbaikan struktur dan nonstruktur bangunan sekolah, ruang kelas, ruang penunjang, sanitasi, sistem kelistrikan, penyediaan air bersih, serta utilitas lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kualitas bangunan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pemanfaatan sarana prasarana.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik dan tenaga pendidik, serta terjaganya keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas di satuan Pendidikan dialokasikan pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar Rp.505.000.000 dan realisasi Rp496.226.000 (98.26%)

Dukungan sarana yang efektif dalam meningkatkan proses belajar mengajar, terlihat dengan tersedianya prasarana yang mendukung peningkatan literasi siswa. Oleh karena itu diperlukan tersedianya perpustakaan sekolah yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan belajar, sumber informasi, sarana memperluas pengetahuan, sarana menumbuhkan ide kreatifitas, serta meningkatkan minat baca siswa. Bentuk dukungan dalam penyediaan perpustakaan pada tahun 2025, dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan di 1 sekolah yaitu SD N 3 Binangun Kec. Watumalang, dengan jumlah anggaran Rp200.000.000 direalisasikan Rp194.672.000 (97.34%).

Ketersediaan perlengkapan sekolah yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Dengan perlengkapan yang lengkap, seperti buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan lainnya, siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus. Selain itu, ketersediaan perlengkapan sekolah juga membantu meningkatkan motivasi belajar serta rasa percaya diri siswa dalam mengikuti pelajaran. Bagi guru, perlengkapan yang memadai memungkinkan mereka mengajar dengan lebih baik dan menyampaikan materi secara optimal. Oleh karena itu, memastikan setiap siswa memiliki akses terhadap perlengkapan sekolah yang memadai adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan merata. Guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik,

pada tahun 2025 dialokasikan anggaran pada Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebesar Rp643.783.000 dengan realisasi Rp586.622.476 (91.12%) yang dipergunakan untuk penyediaan perlengkapan TIK di 6 sekolah antara lain yang dipergunakan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi di 6 sekolah, pengadaan komputer di SD NEGERI 3 KERTEK, SD NEGERI 3 LAMUK, SD NEGERI 4 JARAKSARI, SD NEGERI 2 WADASLINTANG, SD NEGERI TAWANGSARI, SD NEGERI 2 EROREJO.

Pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik dengan anggaran Rp550.000.000 terealisasi Rp0 (0%) disebabkan oleh kendala pada proses pengadaan barang, di mana ketersediaan spesifikasi teknis barang yang diusulkan dalam Pokir tidak tersedia di e-katalog hingga akhir tahun anggaran, serta adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penyesuaian spesifikasi.

Ketersediaan laboratorium di sekolah memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran sains, teknologi, dan praktik kejuruan. Laboratorium memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktik langsung, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman teori tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dengan fasilitas laboratorium yang memadai, siswa dapat lebih aktif dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Selain itu, keberadaan laboratorium juga berkontribusi dalam menumbuhkan minat siswa terhadap bidang sains dan teknologi, yang dapat mendorong mereka untuk mengembangkan inovasi serta berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Oleh karena itu, sekolah perlu memastikan laboratorium tersedia dan terawat dengan baik agar kualitas pendidikan semakin meningkat salah satunya dengan melaksanakan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar dengan anggaran Rp775.000.000 terealisasi Rp752.541.000 (97.10%) di 4 sekolah yaitu SD N 1 Bomerto, SD N 1 Ngalian, SD N 1 Tambi, SD N 1 Kertek.

Ketersediaan ruang kelas dan daya tampung sekolah memiliki peran krusial dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Ruang kelas yang memadai memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung dengan nyaman, efektif, dan kondusif, sehingga siswa dapat menerima

materi dengan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan ruang kelas seringkali menyebabkan kepadatan siswa yang berlebihan, menghambat interaksi antara guru dan murid, serta menurunkan kualitas pembelajaran. Selain itu, daya tampung sekolah yang mencukupi memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala keterbatasan fasilitas. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan merata bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilaksanakan pembangunan ruang kelas melalui sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp810.000.000 terealisasi Rp802.829.000 (99.11%) yang berlokasi di 5 sekolah diantaranya SD Negeri 1 Lumajang, SD Negeri Pucungwetan, SD Negeri 2 Trimulyo, SD Negeri Wonolelo, MI Ma'arif Medono Kaliwiro.

Selain itu terhadap kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan dilakukan rehabilitasi melalui sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran Rp3.850.000.000 dan realisasi Rp3.805.941.000 (98.86%) yang mencakup 20 sekolah diantaranya SD Negeri 3 Kemiriombo, SD Negeri Lipursari, SD Negeri 1 Bumitirto, SD Negeri 2 Gadingrejo, SD Negeri 1 Sumberejo, MI Ma'arif Ngalian, SD Negeri Simbarejo, SD Negeri 1 Kaligowong, SD Ma'arif Tieng, MI Rifa'iyah Dalangan, SD Negeri 1 Kedalon, SD Negeri 3 Tirip, SD Negeri 1 Kaliguwo, SD Negeri Ngasinan, SD Negeri Pancurwening, SD Negeri 1 Kalimendong, SD Negeri 1 Pengarengan, SD Negeri 1 Kagungan, SDN Lebak, SDN 1 Purwojiwo.

Disamping penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pembinaan minat dan bakat memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa. Setiap siswa memiliki potensi tersendiri baik dalam bidang akademik, seni, olahraga, maupun keterampilan lainnya. Dengan pembinaan yang tepat, mereka dapat menemukan dan mengasah kemampuan yang dimiliki sehingga dapat berkembang sesuai dengan passion dan potensi terbaiknya. Selain itu, pembinaan minat dan bakat juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, serta motivasi belajar siswa. Dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan manfaat bagi masa depan mereka baik dalam dunia pendidikan, karier, maupun kontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, guna mendukung pengembangan potensi siswa jenjang SD dialokasikan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan anggaran Rp250.000.000 dan

realisasi Rp241.047.330 (96.42%) yang dipergunakan untuk Fasilitas Pembinaan Lomba-Lomba Akademik dan Non Akademik di Bidang Pendidikan dari tingkat Kabupaten hingga Nasional.

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidik tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, menginspirasi, dan membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi individu yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Sementara itu, tenaga kependidikan mendukung proses pembelajaran dengan memastikan segala aspek administratif, sarana, dan prasarana pendidikan berjalan dengan baik. Kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan inovatif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Guna mencukupi ketersediaan pendidik maupun tenaga kependidikan sepanjang tahun 2025 dimulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp2.391.800.000 dengan realisasi Rp2.331.660.500 (97.49%) dengan terfasilitasinya kesra Wiyata Bhakti Guru dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan SD sejumlah 149 Guru dan Tenaga Kependidikan, terlatihnya guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas tinggi pada satuan Pendidikan dasar.

Selain kecukupan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi juga diperlukan dalam mendukung proses pembelajaran termasuk mendorong iklim sekolah yang inklusif bagi semua kalangan serta Terpetakannya karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan layanan pendidikan inklusif, meningkatnya kesiapan satuan pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif, serta meningkatnya kapasitas pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang adaptif. Selain itu, tersedianya layanan asesmen lanjutan sebagai dasar pemberian dukungan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dialokasikan pada sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi sebesar Rp.175.000.000 dan Realisasi Rp.173.839.640 (99.34%) Guna mendukung iklim satuan pendidikan yang inklusif, dilaksanakan kegiatan identifikasi dan asesmen peserta didik penyandang disabilitas serta peningkatan kompetensi bagi guru yang

menangani siswa penyandang disabilitas. Sampai dengan tahun 2025 tercatat sebanyak 613 peserta didik yang diduga sebagai penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, peserta didik yang telah menjalani proses asesmen menunjukkan beragam karakteristik dan kebutuhan khusus, dengan hasil antara lain ADHD, Autisme, Badan Mini, Hambatan Penglihatan, Hambatan Intelektual, Hambatan Pendengaran, Hambatan Emosi dan Perilaku, Hambatan Fisik, Borderline, Down Syndrome, Speech Delay, Superior, Lamban Belajar (Slow Learner), Kondisi Lainnya, serta Hambatan Ganda/Tuna Ganda. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Lingkungan Sekolah yang Inklusif di 8 sekolah. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, telah diselenggarakan Workshop pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pada tahun 2025, sebanyak 239 guru telah dilatih dan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut guna mendukung penerapan pembelajaran yang adaptif dan inklusif di satuan pendidikan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan tes pendengaran terhadap 21 peserta didik penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan SLB B Don Bosco, serta tes psikologi bagi 78 peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam mendukung peningkatan kompetensi guru serta Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dengan adanya kegiatan Bakal Calon Kepala Sekolah sejumlah 103 Calon Kepala Sekolah, dan Penguatan Pembekalan Kepala Sekolah Baru dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp355.400.000 dengan realisasi Rp293.538.315 (82.59%).

Guna meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru mata pelajaran Bahasa Jawa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam (deep learning) pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan sebagai wadah penguatan pemahaman guru terhadap kurikulum, capaian pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada pengembangan karakter, literasi budaya, dan kearifan lokal. Kegiatan Bimtek meliputi peningkatan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan modul ajar, penerapan metode dan model pembelajaran inovatif, pemanfaatan media pembelajaran, serta penyusunan instrumen asesmen yang selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Materi juga

diarahkan pada penguatan penggunaan bahasa, sastra, dan budaya Jawa dalam pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan guru Bahasa Jawa mampu mengimplementasikan pembelajaran yang lebih bermakna, interaktif, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran Bahasa Jawa di satuan Pendidikan dianggarkan pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebesar Rp.35.150.000 dengan realisasi Rp34.411.500 (97.90%) output yang dihasilkan dari sub kegiatan tersebut Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bintek) Guru Mapel Bahasa Jawa , untuk mendukung pembelajaran mendalam pada mata pelajaran bahasa Jawa.

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.50.000.000 dengan realisasi Rp46.256.000 (92.51%) yang diwujudkan berupa Kegiatan Penguatan komunitas Guru Kelas rendah yang berimplementasi pada pembelajaran Mendalam, dilaksanakan pada bulan Juli s.d Desember 2025 dengan harapan bisa ditularkan kepada Guru Guru di sekolahnya.

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelembagaan yang kuat memungkinkan sekolah memiliki visi, misi, serta aturan yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sementara itu, manajemen sekolah yang baik memastikan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Dengan pembinaan yang berkelanjutan sekolah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, menerapkan inovasi dalam pembelajaran, serta membangun budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian prestasi peserta didik. Oleh karena itu pada tahun 2025 dilaksanakan Fasilitasi Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Sehat dan Akreditasi Sekolah Unggul serta Peningkatan Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Inklusivitas dan Iklim Kebhinekaan pada rapor Pendidikan, yang dipergunakan untuk Fasilitasi Sekolah menuju Peningkatan Iklim Lingkungan Belajar di Sekolah serta fasilitasi Dewan Pendidikan yang dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah sebesar Rp185.000.000 dengan realisasi Rp182.312.090 (98.55%).

Guna keberlangsungan operasional pembelajaran di sekolah pada tahun 2025 semua satuan pendidikan SD menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah seperti pembelian alat pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan adanya BOSP, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, memastikan akses yang merata bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, bantuan ini juga membantu meringankan beban finansial orang tua dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Besaran anggaran BOSP jenjang SD tahun 2025 pada sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp58.872.000.000 dengan realisasi Rp55.331.522.506 (93.99%) yang bersumber dari DAK non fisik.

Selain itu, dialokasikan juga BOSP Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, penerima pembayaran honorarium Tenaga Wiyata Bakti pada Satuan Pendidikan dan honorarium pengelola Dana BOS pada 444 Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan anggaran Rp.2.344.240.728 dengan realisasi Rp2.073.789.756 (88.46%). BOSP dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah sepanjang tahun 2025 sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Serta Peningkatan Pengelolaan Dana BOSP pada 461 satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Revitalisasi Sekolah pada Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 190.000.000 dengan realisasi Rp189.999.920 (100%).

Penyelenggaraan proses belajar peserta didik merupakan upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam mengeksplorasi, menganalisis, serta mengembangkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan

berbagai sumber belajar yang relevan turut mendukung terciptanya pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan serta meningkatkan kualitas proses belajar yang berlangsung. Fasilitasi penyelenggaraan proses belajar diwujudkan dalam alokasi anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik dengan anggaran Rp150.000.000 dan realisasi Rp120.862.900 (80.58%) yang antara lain dipergunakan untuk fasilitasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SD, monitoring komunitas belajar (K3S dan KKG) serta sosialisasi dan monitoring Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dilaksanakan pada rentang bulan Mei sampai dengan Oktober 2025.

Program Revitalisasi sekolah Dasar yang sebesar Rp.9.817.070.074 bersumber dana dari pusat, ada 20 penerima Revitalisasi jenjang SD yang mendapatkan Program revitalisasi sekolah, serta yang menerima Bantuan Tidak Terduga sebesar Rp.900.000.000 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp.350.000.000 dengan lokasi penerima SD N 1 Suroyudan Kec. Sukoharjo, SD N 2 Wonoroto Kec. Watumalang dan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp.550.000.000 dengan lokasi SD N 1 Pengarengan Ke. Kalibawang, SD N Lebak Kecamatan Kaliwiro, SD N 1 Purwojiwo Kecamatan Kalikajar.

b. Pengelolaan Pendidikan SMP

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP terdiri atas 20 (dua puluh) sub kegiatan, dimana secara umum ditujukan untuk perluasan akses layanan dan peningkatan mutu sehingga angka partisipasi sekolah dan kualitas hasil belajar jenjang pendidikan SMP/ sederajat diharapkan dapat meningkat. Cakupan output pada tiap sub kegiatan kegiatan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan sekolah serta pengembangan untuk mendorong potensi peserta didik.

Guna keamanan dan kenyamanan warga sekolah, dilaksanakan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp306.500.000 dan realisasi Rp301.788.000 (98.46%) yang dipergunakan untuk penataan lingkungan di SMP Negeri 2 Kertek dan SMP PGRI Leksono.

Disamping itu untuk memulihkan fungsi laboratorium sekolah yang mengalami kerusakan sedang maupun berat agar kembali memenuhi standar kelayakan, keselamatan, dan kenyamanan sebagai sarana

pembelajaran praktik. Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan kondisi fisik dan tingkat kerusakan laboratorium serta mengacu pada standar teknis sarana laboratorium pendidikan yang berlaku. Lingkup kegiatan meliputi perbaikan struktur dan nonstruktur bangunan laboratorium, peningkatan sistem utilitas seperti kelistrikan, ventilasi, pencahayaan, sanitasi, serta penataan ruang laboratorium agar sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pembelajaran. Kegiatan ini juga memperhatikan aspek keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan pemanfaatan laboratorium. Melalui pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium diharapkan laboratorium sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pendukung pembelajaran berbasis praktik dan eksperimen, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi peserta didik dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000 dan realisasi Rp198.558.000 (99.28%) di lokasi SMP Negeri 2 Wonosobo.

Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan sedang maupun berat agar kembali laik fungsi, aman, dan nyaman sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan dan penilaian tingkat kerusakan ruang kelas serta mengacu pada standar teknis bangunan pendidikan yang berlaku. Lingkup kegiatan meliputi perbaikan struktur dan nonstruktur bangunan ruang kelas, seperti dinding, lantai, atap, plafon, pintu, dan jendela, serta peningkatan sistem pendukung berupa pencahayaan, ventilasi, dan utilitas lainnya. Pelaksanaan sub kegiatan ini memperhatikan aspek keselamatan, kualitas bangunan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pemanfaatan ruang kelas. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan tercipta ruang kelas yang layak, aman, dan kondusif bagi peserta didik dan pendidik, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp.850.000.000 dan realisasi Rp840.845.000, (98.92%) di 5 satuan Pendidikan diantaranya SMP N 3 Leksono, SMP N 1 Wonosobo, SMP N 1 Sukoharjo, SMP N 1 Wadaslintang, MTs Ma'arif Garung.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula diharapkan ruang serba guna/aula dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran,

pertemuan, kegiatan kesiswaan, dan kegiatan sekolah lainnya, sehingga mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang representatif dan kondusif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dan Realisasi Rp197.818.000 (98,91%) di SMPN 2 Kaliwiro.

Belanja Tidak Terduga merupakan sub kegiatan yang disediakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan tidak tertampung dalam program dan kegiatan lainnya. Sub kegiatan ini digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat, kejadian luar biasa, bencana alam maupun non alam, serta kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera guna menjaga kelangsungan penyelenggaraan layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyaluran dan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang serta didukung dengan administrasi dan pertanggungjawaban yang lengkap. Melalui sub kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas anggaran untuk merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Terdapat Belanja Tidak Terduga (BTT), di sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp550.000.000 dan realisasi Rp540.235.000 (98.22%) dengan rincian lokasi SMP N 4 Wadaslintang, SMP N 3 Kepil, dan SMP N 5 Kepil.

Guna keberlangsungan proses belajar mengajar dan perluasan daya tampung sekolah, pada tahun 2025 dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp300.000.000 dan realisasi Rp297.114.000 (99.04%) di SMP Negeri 1 Kaliwiro dan MTS Hidayah Al Quran Jojogan.

Sedangkan pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha yang mengalami kerusakan sedang maupun berat agar kembali laik fungsi, aman, dan nyaman sebagai sarana pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dan administrasi sekolah. Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan dan

penilaian tingkat kerusakan bangunan serta mengacu pada standar teknis bangunan pendidikan yang berlaku. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan tercipta ruang kerja yang layak, aman, dan kondusif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja, kualitas layanan administrasi, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah dan dialokasikan anggaran Rp200.000.000 dengan realisasi Rp198.346.000 (99.17%) di SMP Negeri 1 Mojotengah.

Dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, kebutuhan perlengkapan peserta didik guna mendukung kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran. Pengadaan perlengkapan peserta didik dilaksanakan untuk memastikan setiap peserta didik memiliki sarana belajar dasar yang memadai, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meningkatnya motivasi belajar, serta terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebesar Rp293.500.000.

Guna mendukung pembelajaran yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan berbasis pengalaman langsung. Pengadaan alat praktik dan peraga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan, dan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan karakteristik mata pelajaran. Melalui pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar serta keterampilan peserta didik. Pada sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.728.000.000, yang bersumber dana dari DAK sebesar Rp.228.000.000 dan realisasi Rp.211.796.000 serta APBD Rp.500.000.000. Adapun lokasi yang bersumber dana dari DAK yang diperuntukkan dalam bentuk peralatan laboratorium di SMP 1 Kalibawang, SMP N 6 Wadaslintang, SMP N 3 Kalikajar, SMP N 3 Garung. Selain itu dialokasikan juga pengadaan alat musik SMP Negeri 3 Sukoharjo, SMP Maarif Mlandi dan SMP Al-Islah,

Guna mendukung pengembangan potensi siswa jenjang pendidikan SMP, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sebesar Rp200.000.000 dengan realisasi

Rp185.969.335 (92.98%) yang dipergunakan untuk Fasilitasi Peserta didik dalam meraih Prestasi Akademik dan Non Akademik Bidang Pendidikan penyelenggaraan perlombaan yang mendorong pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa baik di bidang akademik dan non akademik antara lain Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) jenjang SD sejumlah 63 pemenang dari 6 cabang lomba, jenjang SMP sejumlah 98 pemenang dari 8 cabang lomba, Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) jenjang SD sejumlah 198 pemenang dari 23 cabang lomba, jenjang SMP sejumlah 179 pemenang dari 12 cabang lomba, Mapel Agama Kristen (MAPAK) jenjang SD sejumlah 33 pemenang dari 4 cabang lomba, jenjang SMP sejumlah 12 pemenang dari 1 cabang lomba. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP sejumlah 14 pemenang dari 2 cabang lomba, Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD sejumlah 15 pemenang dari 3 cabang lomba, jenjang SMP sejumlah 15 pemenang dari 3 cabang lomba dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) jenjang SD sejumlah 84 pemenang dari 7 cabang lomba, jenjang SMP sejumlah 84 pemenang dari 8 cabang lomba.

Sedangkan untuk memenuhi kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.540.535.000 dengan realisasi Rp1.499.505.000 (97.34%) untuk pelaksanaan sepanjang tahun 2025 dimulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Sedangkan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan tenaga kependidikan, Bimtek, Fasilitasi Kegiatan Diklat KKA Bagi Komunitas Guru Berbagi sejumlah 450 Orang Guru dari Komunitas Guru Berbagi Wonosobo, sosialisasi kepegawaian di satuan Pendidikan, dialokasikan pada sub kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.39.600.000 dan Realisasi Rp39.550.000 (99.87%) yang menghasilkan output diantaranya terfasilitasinya kegiatan Diklat KKA bagi Guru yang tergabung pada Komunitas Belajar Guru Berbagi sejumlah 450 orang, guna menunjang program prioritas kemendikdasmen dan mempersiapkan pendidik yang siap mengajar Mapel KKA yang pada tahun Ajaran 2025/2026 sudah mewajibkan Mapel Koding dan KA pada jenjang SD dan SMP sejumlah 2 JP/Minggu.

Guna mendukung peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan Fasilitasi diklat PPG bagi Guru PAI sejumlah 90 orang tertuang dalam sub kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebesar Rp. 255.000.000 dan realisasi Rp76.240.000 (29.90%). Tetapi pada anggaran perubahan ada kebijakan dari kementerian agama untuk Guru PAI yang belum bersertifikat pendidik akan diberikan bea pendidikan PPG daljab dari Anggaran APBN, sehingga anggaran tidak bisa terserap 100%.

Sedangkan peningkatan inklusivitas sekolah melalui workshop penanganan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) dialokasikan pada sub kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi sebesar Rp100.000.000 dan realisasi Rp96.805.880 (96.81%), Adapun kegiatan yang dihasilkan Terpetakannya karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan layanan pendidikan inklusif, meningkatnya kesiapan satuan pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif, serta meningkatnya kapasitas pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang adaptif. Selain itu, tersedianya layanan asesmen lanjutan sebagai dasar pemberian dukungan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu Pelaksanaan Kegiatan Ajang Aku bisa yang diikuti oleh 150 Peserta yang bertujuan untuk memberikan wadah untuk mengembang kreativitas, bakat dan minat peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, telah diselenggarakan workshop pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pada tahun 2025, sebanyak 239 guru telah dilatih dan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut guna mendukung penerapan pembelajaran yang adaptif dan inklusif di satuan pendidikan.

Dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dipergunakan untuk kegiatan coaching clinic dan pelaksanaan uji kompetensi guru untuk kenaikan jenjang dan uji kompetensi guru menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah, dan dipergunakan untuk kegiatan evaluasi kinerja melalui sosialisasi dan desk penyusunan pengelolaan kinerja melalui ruang GTK dan E Kinerja BKN , juga dipergunakan desk verifikasi TPG.

Guru yang lulus ukom dan sudah kenaikan jenjang jabatan sejumlah 124 orang terdiri dari jenjang guru ahli pertama ke guru ahli muda sejumlah 79 orang dan jenjang guru ahli muda ke ahli madya sejumlah 45 orang. terlaksananya uji kompetensi guru menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah sejumlah 123 guru dengan hasil kelulusan 99.9% dr jumlah kebutuhan kepala sekolah sekolah, sehingga, data guru yang sudah mempunyai sertifikat calon kepala sekolah terpenuhi. terfasilitasinya kegiatan sosialisasi dan desk kinerja, sehingga penyusunan SKP dan PAK Baik di pengelolaan kinerja di ruang GTK dan di E Kinerja BKN bisa terlaksana 100%, dan tersedianya data valid dari penerima TPG. Alokasi Anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp131.667,000, dengan realisasi Rp89.969.099 (68.33%).

Pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dialokasikan anggaran Rp500.000.000 dengan realisasi Rp415.980.755 (83.20%) yang dipergunakan untuk Sekolah Ramah Anak, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Sehat dan Akreditasi Sekolah Unggul serta Peningkatan Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Inklusivitas dan Iklim Kebhinekaan pada rapor pendidikan, dan alokasi afirmasi operasional sekolah satu atap Se-Kabupaten Wonosobo (18 sekolah). Selain itu guna mendukung keberlangsungan operasional dan proses pembelajaran. Guna menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, melalui sumber dana DAK non fisik dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.35.028.366.400 dengan realisasi Rp31.464.849.650 (89.83%). Serta dilakukan Fasilitasi kegiatan pelaporan pengelolaan BOS dan monitoring pelaksanaan kegiatan BOS pada satuan pendidikan menengah dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BOSP ,rekonsiliasi BOSP, dan fasilitasi aplikasi SIMPELBOSP yang dialokasikan pada sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan sebesar Rp.146.766.000 dan realisasi Rp118.662.735 (80.85%).

Disamping itu, pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp2.523.329.200 dengan realisasi Rp1.476.522.990 (58.51%) yang dipergunakan untuk bantuan operasional satuan pendidikan dari APBD Kabupaten Wonosobo berupa belanja personalia maupun non personalia pada satuan pendidikan. Selain itu, Pemberian Beasiswa

Pendidikan setiap semester untuk pengentasan anak tidak sekolah yang kembali bersekolah sebagai bagian dari penanganan kemiskinan dan alokasi dana untuk mendukung pembayaran honorarium Tenaga Wiyata Bakti pada Satuan Pendidikan dan honorarium pengelola Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri. Pemberian beasiswa pendidikan untuk siswa formal dan nonformal, tahap 1 sebanyak 327 siswa dan 336 siswa, Penerima pembayaran honorarium Tenaga Wiyata Bakti pada Satuan Pendidikan dan honorarium pengelola Dana BOS pada 444 Satuan Pendidikan Dasar Negeri

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, dialokasikan anggaran Rp125.000.000 dengan realisasi Rp117.046.870 (93.64%) yang penggunaannya antara lain untuk fasilitasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), monitoring implementasi kurikulum merdeka, sosialisasi dan monitoring Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), sosialisasi penulisan ijazah, workshop penguatan penilaian peserta didik berkebutuhan khusus, Workshop Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah, dan sosialisasi partisipasi pendidikan bagi masyarakat Wonosobo yang dilaksanakan pada rentang bulan Mei sampai dengan Oktober 2025.

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan tahap paling krusial dalam proses pembentukan dasar-dasar kepribadian dan kemampuan anak yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, serta intelektual. Pada periode usia 0 hingga 6 tahun, otak anak berkembang dengan sangat pesat bahkan lebih dari 80% kapasitas otaknya terbentuk pada usia ini. Oleh karena itu, setiap interaksi dan pengalaman yang mereka alami pada masa ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak baik dalam hal keterampilan motorik, Bahasa, maupun pemahaman konsep dasar.

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh melalui berbagai kegiatan yang dirancang agar menyenangkan dan mendidik seperti bermain, bernyanyi, menggambar, dan berbagai bentuk aktivitas yang merangsang kreativitas serta kecerdasan anak. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya sekadar untuk mengisi waktu tetapi juga untuk merangsang perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Pada tahap ini anak mulai belajar mengenal warna bentuk, angka, huruf, serta berbagai konsep dasar lainnya yang menjadi dasar bagi perkembangan akademis mereka di masa depan.

Lebih dari sekadar pembelajaran akademis, PAUD juga berperan penting dalam

pengembangan aspek sosial dan emosional anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan pendidik, anak-anak belajar bagaimana berkomunikasi, berbagi, menyelesaikan konflik, serta membangun empati dan rasa saling menghormati. Pendidikan yang baik pada usia dini mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial yang akan membekali anak untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Pendidikan ini juga membantu anak untuk mengenali dan mengelola emosinya, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya diri.

Pendidikan anak usia dini yang berkualitas mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan formal dengan keterampilan dasar yang sudah terasah seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan sosial dan emosional. Anak-anak yang mendapat pendidikan usia dini yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam belajar di sekolah, serta dapat beradaptasi dengan lebih baik dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, PAUD bukan hanya sebagai tahap transisi menuju pendidikan formal, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Upaya peningkatan partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana maupun dukungan penyelenggaraan bagi proses pembelajaran.

Penyediaan sarana prasarana diwujudkan dalam bentuk Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD. Alokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2025 sebesar Rp.550.000.000 dengan realisasi Rp542.501.000 (98,54%) yang berada di 4 lokasi satuan pendidikan. Kegiatan pembangunan maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2025.

Selain itu dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp45.000.000 dengan realisasi Rp43.975.220 (97.72%). Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung perkembangan dan kreativitas anak serta promosi peningkatan partisipasi dan minat anak untuk ikut serta dalam pendidikan PAUD. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Ajang Kreativitas Anak Usia Dini, Fasilitasi Mendongeng, Operasional TK Negeri Pembina Sapuran,

Operasional TK Negeri Pembina Wonosobo, Operasional TK Negeri Pembina Selomerto, Peningkatan Kapasitas Pengajar PAUD.

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam keberlangsungan pembelajaran adalah ketersediaan tenaga pendidik. Pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memegang peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak-anak pada masa-masa awal kehidupannya. Sebagai pengarah dan pembimbing, pendidik PAUD tidak hanya bertugas mengajar tetapi juga membimbing anak-anak untuk mengenal dan memahami dunia di sekitar mereka melalui aktivitas yang mendidik dan menyenangkan. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, yang memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Pendekatan yang penuh kasih sayang dan perhatian dari seorang pendidik PAUD membantu membangun rasa percaya diri dan harga diri anak. Selain itu, mereka juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial sejak dini, yang akan membekali anak untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pendidik PAUD adalah pilar penting dalam meletakkan dasar yang kuat bagi pendidikan dan perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi ketersediaan maupun peningkatan mutu tenaga pendidik dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan serta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

Besaran alokasi anggaran untuk intervensi kompetensi pendidik PAUD pada tahun 2025 adalah Rp3.162.290.000 dengan realisasi Rp3.096.788.950 (97.93%). Pelaksanaan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, Pengelolaan Dana untuk mendukung pembayaran honorarium Tenaga Wiyata Bakti dan honorarium Tenaga Karya Bakti pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mencakup kesra Wiyata Bhakti Guru dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan PAUD sejumlah 169 Guru dan Tenaga Kependidikan, terlatihnya PTK PAUD dalam kompetensi sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Sedangkan pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD ditujukan untuk Pengelolaan Dana untuk

mendukung pembayaran honorarium Tenaga Wiyata Bakti dan honorarium Tenaga Karya Bhakti pada Satuan PAUD; serta Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang S1 Guru PAUD, dan Peningkatan Kapasitas Pengajar PAUD. Serta fasilitasi bagi Satuan Pendidikan PAUD Negeri di kabupaten Wonosobo.

Pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD sebesar Rp.33.400.000 dan realisasi Rp.33.400.000 (100%),

Sementara pada sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, kegiatan dilaksanakan untuk Bimbingan Teknis Parenting PAUD, Bimbingan Teknis Transisi PAUD SD Yang Menyenangkan, Lokakarya Wajib Belajar 13 Tahun untuk mendukung pembelajaran yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November 2025. Keberlangsungan operasional dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan faktor krusial dalam memastikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak pada usia emas mereka. PAUD yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek pendanaan tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, serta kepemimpinan yang visioner. Keberlanjutan ini membutuhkan perencanaan yang matang, baik dalam hal kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak maupun dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, kelembagaan PAUD harus mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta selalu berinovasi dalam metode pengajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memperkuat kelembagaan, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pendidik, serta memastikan adanya dukungan yang stabil dari berbagai pihak, operasional PAUD dapat berlangsung secara efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Oleh karena itu, untuk penguatan kelembagaan PAUD dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp94.000.000 dengan realisasi Rp88.290.000 (93.93%) , Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp.135.000.000 dan realisasi Rp.127.590.000 (94.51%). Berdasarkan data lembaga PAUD di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejumlah 659, telah terakreditasi sebanyak 609 lembaga dengan rincian terakreditasi A sebanyak 47 lembaga, terakreditasi B sebanyak 453 lembaga, terakreditasi C sebanyak 109 lembaga dan sisanya 50 lembaga belum terakreditasi.

Disamping itu, untuk mendukung operasional Lembaga PAUD sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, sejumlah 663 lembaga PAUD memperoleh alokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP PAUD) dan fasilitasi untuk pengelolaan BOP PAUD. Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan anggaran Rp15.065.709.000 dengan realisasi Rp15.049.772.352 (99,89%), serta untuk fasilitasi rekonsiliasi dana BOP dan peningkatan kapasitas pengelola BOP PAUD pada sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.53.240.000 dan realisasi Rp.52.494.000 (98.60%). Setiap satuan Pendidikan/Lembaga PAUD memperoleh alokasi BOP dengan besaran alokasi ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar pada satuan Pendidikan.

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pendidikan non formal atau kesetaraan memberikan landasan bagi individu untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti sanggar belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kursus memiliki peranan yang signifikan. Mereka menyediakan berbagai program yang menjangkau berbagai usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan materi yang bervariasi seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, dan pengembangan diri.

Salah satu keunggulan pendidikan non formal atau kesetaraan adalah pada aspek fleksibilitas. Peserta didik dapat memilih waktu dan cara belajar yang paling sesuai dengan kondisi mereka sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, pendidikan non formal atau kesetaraan juga mendorong peserta untuk aktif berperan serta dalam belajar dalam meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi. Lebih jauh lagi, pendidikan non formal atau kesetaraan menjadi alat penting dalam upaya meningkatkan kesetaraan akses pendidikan. Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala seperti masalah ekonomi, jarak, atau latar belakang social pendidikan non formal menawarkan solusi alternatif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian pendidikan non formal berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program yang inklusif dan relevan, pendidikan non formal tidak hanya membantu individu mencapai

potensi penuh mereka tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kesinambungan pembangunan dalam masyarakat.

Adapun tujuan utama pendidikan kesetaraan ke depan antara lain (1) menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritas etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) melayani peserta didik (warga belajar) yang memerlukan pendidikan akademik dan keterampilan atau kecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya; (5) berkembangnya teknologi dan kemajuan pada berbagai aspek. Fungsi dan tujuan pendidikan kesetaraan selama ini tetap relevan mengingat masih adanya anak putus sekolah dalam dan antar jenjang Pendidikan, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan banyaknya masyarakat yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah sebagai pengakuan kualifikasi akademiknya mengindikasikan keberadaan pendidikan kesetaraan dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2025 untuk mendukung pengelolaan pendidikan nonformal atau kesetaraan dialokasikan anggaran sejumlah Rp10.903.805.714 dengan realisasi Rp.9.658.127.089 (87.75%).

Alokasi anggaran pada pendidikan nonformal atau kesetaraan tersebut sebagian besar dipergunakan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru, bantuan sarana dan prasarana, Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran mencapai Rp4.491.285.714 dengan lokasi sasaran pada 37 TPQ/Madin/Ponpes yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan selesai pada bulan Desember 2025. Serta Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dialokasikan untuk SKB dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000 dan direalisasikan Rp.38.549.557 (96.37%) Guna mendukung operasional pembelajaran pada satuan Pendidikan Non formal atau kesetaraan di Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, sebanyak 20 PKBM dan 1 Satuan Pendidikan Nonformal SKB mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan senilai Rp6.275.760.000 dengan realisasi serapan Rp6.228.092.262 (99.24%). BOP dimaksud untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C baik di

PKBM maupun SKB. Untuk Mendukung peningkatan Pengelolaan dana BOP diselenggarakan kegiatan Rekonsiliasi BOSP Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan BOSP Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp. 20.000.000 dan realisasi Rp19.575.000 (97.88%).

Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga

pendidikan nonformal, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp.51.760.000 dan realisasi Rp.50.562.500 (97.69%), Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000 dan realisasi Rp23.700.000 (94.80%) untuk diselenggarakan Sosialisasi, Bimtek serta Peningkatan Kapasitas terkait Penyusunan RKT/RKAS, Pengelolaan Dapodik serta SPMB Pendidikan Nonformal Kesetaraan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp10.903.805.714 dengan Realisasi sebesar Rp9.568.127.089 (87.75%)

e. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Program pengembangan kurikulum ditujukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kegiatan pada program pengembangan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar berupa pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Entrepreneur bagi Guru SD dan Guru SMP. Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) SD dan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) SMP, pembelajaran mendalam (deep learning), berbasis proyek (Project-Based Learning), penguatan karakter (seperti 7 kebiasaan anak Indonesia), serta integrasi Koding & AI serta Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah untuk Menjamin Iklim Keamanan Sekolah Iklim Kebhinekaan Inklusivitas SD/SMP. Anggaran pada program pengembangan kurikulum dialokasikan Rp235.000.000 dengan realisasi Rp210.286.690 (89.48%) yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November 2025.

Pengembangan dan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kebijakan kurikulum diarahkan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara terencana, adaptif, dan kontekstual, dengan tetap mengacu pada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional.

Kerangka dasar kurikulum menjadi acuan utama dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yang diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional serta Standar Nasional Pendidikan. Kerangka ini menekankan pengembangan kompetensi peserta didik secara utuh, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai hasil dari proses pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, pengorganisasian pembelajaran dilakukan melalui pengaturan struktur kurikulum yang meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran disusun berdasarkan perencanaan berbasis data, dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, karakteristik peserta didik, ketersediaan sumber daya, serta kondisi lingkungan belajar. Pendekatan pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel melalui berbagai model, seperti pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, integratif, maupun pendekatan lain yang relevan. Untuk mendukung proses pembelajaran, satuan pendidikan memanfaatkan dan mengembangkan perangkat ajar yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Perangkat ajar digunakan sebagai pedoman pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta sebagai sarana untuk mendorong pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi serta karakter peserta didik.

Penentuan alokasi waktu pembelajaran dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan struktur kurikulum dan beban belajar peserta didik. Pengaturan waktu pembelajaran disepakati dan ditetapkan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pelajaran, sehingga memberikan keleluasaan dalam pengelolaan pembelajaran sekaligus menjamin ketercapaian kompetensi yang ditargetkan.

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, satuan pendidikan melaksanakan asesmen pembelajaran secara berkelanjutan. Asesmen digunakan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar peserta didik, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar perbaikan strategi pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dilakukan secara berimbang melalui asesmen formatif dan sumatif, dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, dan kebermanfaatan.

Hasil dari proses pembelajaran dan asesmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam laporan kemajuan belajar peserta didik yang bersifat sederhana, informatif, dan mudah dipahami. Laporan

kemajuan belajar dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua, serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran dilaksanakan sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan, melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan dan tantangan di masa mendatang.

- f. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan total anggaran Rp72.800.000 dan realisasi dengan serapan sebesar Rp61.770.000 (84.85%). Anggaran pada program ini digunakan untuk fasilitasi Pelatihan Kompetensi Peningkatan Literasi dan Numerasi bagi Pendidik serta pemetaan Kebutuhan ASN. Pemetaan dilaksanakan di setiap korwil (15 Kecamatan) dan finalisasi di Dinas Pendidikan, sasaran seluruh ASN maupun Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

- GURU ASN Guru Kelas ASN : 2565
- Guru PJOK ASN : 288
- Guru PAI ASN : 322
- Guru Kelas Non ASN : 259
- Guru PJOK Non ASN : 38
- Guru PAI Non ASN : 44

- g. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan merupakan aspek krusial dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Di era digitalisasi, pemuda dituntut untuk memiliki keterampilan yang relevan, inovasi, serta daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemudaan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga keterampilan non formal seperti kepemimpinan, kewirausahaan, pemecahan masalah, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat, diperlukan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan potensi pemuda.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda yang bermutu dan berprestasi. Pada tahun 2025, program ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp430.000.000 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp383.021.000 atau sebesar 89,07%.

Pelaksanaan program tersebut dijabarkan ke dalam empat sub kegiatan yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan pemuda, pemberian penghargaan kepemudaan, penguatan kepemimpinan pemuda, serta pengembangan kepeloporan pemuda di tingkat Kabupaten Wonosobo.

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp50.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 92,54%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan bagi wirausaha pemula di bidang pertanian 30 pemuda di lokasi Kecamatan Garung dan bidang pariwisata 30 pemuda di Kecamatan Kalibawang. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah terciptanya wirausahawan pemula di tingkat desa dan/atau kecamatan yang terfokus pada pengembangan potensi pariwisata dan pertanian.

Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Potensi Pemuda dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat serapan sebesar 97,75%. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi yang berjumlah 36 penerima, yang terdiri dari kejuaraan tingkat nasional 8 penerima penghargaan dan kejuaraan tingkat provinsi 28 penerima penghargaan.

Hasil kegiatan ini berupa tersalurkannya penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada pemuda berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi yang telah diberikan.

Selanjutnya, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp180.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 96,26%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelenggaraan lomba Tata Upacara Bendera dan Baris-Berbaris (TUB BB) yang diikuti dengan peserta jenjang SD 16 satuan pendidikan SMP 18 satuan pendidikan SMA 16 satuan pendidikan dengan pemenang juara 1 SDN 1 Kertek, SMPN 1 Mojotengah, SMAN 1 Wonosobo, juara 2 SMPN 2 Wonosobo, SDN

10 Wonosobo SMAN 2 Wonosobo, juara 3 SDN 2 Karangluhur Kertek SMPN 1 Wonosobo SMK N 1 Wonosobo serta pemberian hibah kepada lembaga kepemudaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejumlah Rp100.000.000 untuk 21 Organisasi Kepemudaan. Sub kegiatan ini berhasil mencetak pemuda berprestasi berusia 16–30 tahun yang cakap, berdaya saing, dan disiplin, serta mampu menjadi figur teladan bagi generasi muda. Capaian ini didukung dengan penguatan tata kelola organisasi kepemudaan serta penyelenggaraan kompetisi bola voli indoor antar-pemuda di tingkat kecamatan se-Kabupaten Wonosobo sebagai sarana pengembangan potensi dan sportivitas.

Adapun sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat serapan sebesar 65,74%. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpilihnya perwakilan Pemuda Pelopor Kabupaten Wonosobo untuk mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor tingkat provinsi sebanyak 5 pemuda di Surakarta, yang terdiri dari 2 peserta seni tari, 2 peserta Bahasa Inggris, dan 1 peserta The Song Vocal.

h. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan mutu dan prestasi olahraga. Alokasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp9.280.000.000 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp5.878.442.645 atau sebesar 63,35%.

Pelaksanaan program tersebut dijabarkan ke dalam enam sub kegiatan yang mencakup pengembangan kebijakan keolahragaan, penyediaan dan peningkatan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan atlet berprestasi, peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan, serta pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan di Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp40.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 0,00%. Kegiatan yang direncanakan berupa penyusunan Peraturan Bupati keolahragaan. Namun demikian, anggaran pada sub kegiatan ini belum terserap karena Peraturan Daerah keolahragaan yang ada sudah tidak sesuai dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. Penyusunan Peraturan Daerah keolahragaan direncanakan akan diajukan kembali pada tahun 2026.

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,

Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp2.360.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 93,69%. Kegiatan dilaksanakan melalui pembangunan venue GOR Wonolelo tahap IV, lapangan voli di Wadaslintang, dan pemeliharaan GOR indoor Wonolelo. Hasil yang dicapai berupa terwujudnya sarana prasarana olahraga, yaitu penambahan atribut tribun utama Stadion Gelora Pancasila, pembangunan lapangan voli di RW 4 Kelurahan Wadaslintang dan tribun penonton GOR indoor Wonolelo.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp800.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 86,43%. Kegiatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar pelajar tingkat SD yang diikuti sejumlah 1350 peserta, SMP 1500 peserta, dan SMA 1800 se-Kabupaten Wonosobo. Melalui kegiatan ini, Kabupaten Wonosobo berhasil menjaring atlet pelajar potensial untuk berkompetisi di ajang POPDA, yang terdiri dari 79 atlet pada tingkat Karesidenan untuk 4 cabang olahraga (bola basket, voli indoor, sepak takraw, dan sepak bola), serta 138 atlet pada tingkat Provinsi yang berlaga di 12 cabang olahraga, meliputi voli indoor, sepak takraw, atletik, bulu tangkis, dayung, karate, pencak silat, taekwondo, wushu, tinju, panahan, dan menembak.. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana, prasarana dan beberapa cabang olahraga, yang diselesaikan dengan musyawarah dengan beberapa cabor untuk mencari alternatif alokasi anggaran dan lokasi sarana prasarana yang lebih representatif.

Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 100,00%. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi. Hasil kegiatan berupa tersalurkannya penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada atlet berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi yang berjumlah jenjang internasional sejumlah 1 orang , jenjang nasional sejumlah 97 orang, dan jenjang provinsi 84 orang.

Sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.830.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 46,76%. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian hibah uang kepada lembaga keolahragaan, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sejumlah Rp 2.500.000.000 dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sejumlah Rp 150.000.000. Hasil dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi oleh KONI yang terdiri dari kegiatan operasional KONI maupun fasilitasi berbagai cabor yang bernaung di KONI dan NPCI yang terdiri dari operasional NPCI dan fasilitasi kegiatan PEPARPEDA di tingkat provinsi.

Adapun sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 150.000.000 dengan realisasi serapan sebesar 100,00%. Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan keolahragaan masyarakat, penyelenggaraan event olahraga masyarakat, serta persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA). Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki. Sehingga solusi yang dilakukan adalah mencari sponsorship kegiatan dan memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan evaluasi penggunaan anggaran, evaluasi pelaksanaan kinerja yang didukung dengan pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah dicapai cukup baik sesuai dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari delapan indikator kinerja yang telah diukur diperoleh hasil bahwa semua indikator dengan kriteria sangat tinggi.

Hasil analisis Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk perencanaan program dan kegiatan pengawasan tahun yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait pengawasan yang diperlukan.

4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu penyediaan dan pemerataan akses layanan pendidikan untuk mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah. Hal ini sejalan dengan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu wajib belajar 12 tahun.
- b. Guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, perlu mendorong peningkatan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas melalui satuan pendidikan non formal/kesetaraan.
- c. Meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya untuk usia 13-15 tahun.

- d. Meningkatkan implementasi SAKIP khususnya pada komponen Evaluasi Kuntabilitas Kinerja Internal.

Sebagai wujud pertanggung jawaban laporan capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo menyusun LKjIP berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik yang tergabung dalam Belanja yang bersumber APBD maupun APBN yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan kinerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Informasi kinerja dalam LKjIP ini sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan penentuan reward dan punishment. Selain itu laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo selama tahun 2025 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Wonosobo, 18 Februari 2026

Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 196801041997021002